

PERFORMANCE  
REPORT

# LKIP 2022



*Laporan Kinerja Instansi  
Pemerintah (LKIP) merupakan  
bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan  
tugas dan fungsi yang dipercayakan  
kepada setiap instansi pemerintah  
atas penggunaan anggaran.*

*( Permen PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 )*



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Soejoed No. 5A (0265) 771032 CIAMIS 46213

[www.bpkd.ciamiskab.go.id](http://www.bpkd.ciamiskab.go.id)





## KATA PENGANTAR

**P**uji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan karunia-Nya sehingga Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKD Kabupaten Ciamis Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban (Akuntabilitas) atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dalam mengelola sumber daya dan kebijakan.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Mendorong Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selalu cepat dan tanggap terhadap permasalahan sekaligus mampu untuk menyelesaikan masalah keuangan melalui Pengelolaan Keuangan yang professional, efisien dan efektif.
2. Mendorong Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk tetap menjalin sinergitas dalam Pengelolaan Keuangan antara Pengelola dan Pengguna APBD, masyarakat maupun legislatif dalam upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).
3. Menjadikan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel, efisien dan efektif, mampu mendorong akuntabilitas publik pada Dinas / Badan / Kantor / Bagian lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat Tatar Galuh terhadap jajaran eksekutif dalam rangka mewujudkan Ciamis Menuju Kemandirian Tahun 2024.

Akhirnya, semoga segala upaya kami senantiasa mendapat Ridho dari Allah SWT, seraya terus memohon petunjuk dan pertolongan-Nya dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah menjadi komitmen bersama khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Ciamis, Februari 2023

KEPALA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS



ASER DEDI HERDIANA.,SE.  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19650912 199301 1 001



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
PERNYATAAN TELAH DI REVIEW .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. UMUM.....	1
B. ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS .....	4
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019-2024 .....	8
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA.....	15
B. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .....	17
C. REALISASI BELANJA.....	32
BAB IV PENUTUP .....	35
LAMPIRAN-1 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKD Tahun 2022	
LAMPIRAN-2 Capaian Kinerja Sasaran BPKD Tahun 2022	
LAMPIRAN-3 Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) BPKD Kab. Ciamis Tahun 2022	
LAMPIRAN-4 Prestasi BPKD Kab. Ciamis Tahun 2022	





## PERNYATAAN TELAH DI REVIEW



## DAFTAR TABEL

Nomor	Uraian	Hal
Tabel 1.1	Opini BPK-RI atas LKPD Kabupten Ciamis	1
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis	6
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024	8
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja BPKD Tahun 2022	10
Tabel 2.4	Pagu Program Kegiatan BPKD Tahun 2022	10
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Program Kegiatan Tahun 2022	11
Tabel 3.1	Capaian Target Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	18
Tabel 3.2	Capaian Target Kinerja Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	19
Tabel 3.3	Capaian Target Kinerja Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	19
Tabel 3.4	Output Kegiatan dan Sub Kegiatan Perencanaan Anggaran, Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran APBD Tahun 2022	21
Tabel 3.5	Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2022	23
Tabel 3.6	Realisasi APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022	24
Tabel 3.7	Capaian Target Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	25
Tabel 3.8	Output Kegiatan, Sub Kegiatan dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	25
Tabel 3.9	Realisasi Penyelesaian Kerugian Daerah s.d 31 Desember 2022	26
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022	27
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2022	28
Tabel 3.12	Capaian Target Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	29
Tabel 3.13	Realisasi PAD Tahun Anggaran 2021 dan 2022	29
Tabel 3.14	Capaian Target Kinerja dengan Realisasi	30
Tabel 3.15	Output Kegiatan, Sub Kegiatan dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	31
Tabel 3.16	Realisasi Belanja BPKD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022	32
Tabel 3.17	Realisasi Belanja Per Program Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022	33



## DAFTAR GRAFIK

Nomor	Uraian	Hal
Grafik 3.1	Grafik Surplus / Defisit APBD Tahun 2022	23
Grafik 3.2	Grafik Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2022	28
Grafik 3.3	Grafik Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022	29
Grafik 3.4	Grafik Target dan Realisasi PAD 2015-2022	30
Grafik 3.5	Grafik Proporsi Belanja BPKD Tahun 2022	33




## RINGKASAN EKSEKUTIF

**S**ejalan dengan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tuntutan peningkatan kinerja merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dalam rangka melaksanakan Pengelolaan Keuangan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis berpedoman pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 dengan Visi **“Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua ”**

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 6 (tiga) Misi, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- 2) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah
- 3) Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal
- 4) Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
- 5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
- 6) Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa



Berdasarkan Misi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ciamis masuk kedalam Misi yang ke 5, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. yaitu Tata kelola pemerintahan masih belum efektif, diantaranya masih terjadinya tumpang tindih kewenangan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan, sehingga perlu dilakukan tata kelola pemerintahan secara efektif dan efisien.

Adapun tujuan, sasaran dan strategi pencapaian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diri pencapaian Misi ke 5 adalah dengan Tujuan Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah dan meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat, Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah, Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui Peningkatan pemahaman aparatur dalam penatausahaan dan pengembangan administrasi keuangan daerah, Pelaksanaan pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien, peningkatan jumlah PAD dalam tiap tahun anggaran, peningkatan optimalisasi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pada pelaporan keuangan daerah serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan barang daerah.

Kebijakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan peningkatan Manajemen Pemerintah.

Berdasarkan evaluasi atau Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), capaian kinerja sasaran atas program dan

kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### **Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD	Baik	Sangat Baik	125
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP BPKD.	BB	BB	100
3	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP BPKD	3	3	100
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan BPKD	100%	100%	100
5	Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu	100%	100%	100
		Ketepatan waktu penetapan APBD	100%	100%	100
6	Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Aset Daerah Yang Terkelola	100%	108%	108
7	Meningkatnya Kemandirian Anggaran	Persentase Kemandirian Keuangan Daerah	5%	5,5%	110
<b>Presentase Rata-rata Capaian Sasaran</b>					<b>105</b>

Dari kondisi objektif di atas, rata-rata nilai capaian sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 105 %. Meskipun keseluruhan target kinerja dapat tercapai, namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari kendala-kendala antara lain dalam hal :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak;
2. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak;
3. Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan belum merata;

Atas dasar kendala-kendala tersebut, upaya yang harus ditempuh guna optimalisasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dimasa mendatang antara lain dengan cara :

1. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan serta regulasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
2. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah melalui kolaborasi internal dan eksternal serta pemanfaatan teknologi informasi;
3. Ekstensifikasi melalui penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lain;
4. Optimalisasi BUMD untuk peningkatan kontribusi terhadap PAD;
5. Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset yang lebih produktif sesuai kebutuhan masyarakat agar lebih berkontribusi terhadap PAD;
6. Pemberian insentif pajak daerah dalam kemudahan berusaha/berinvestasi;
7. Penyempurnaan dalam penyusunan program/sistem pengelolaan keuangan, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan;
8. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan sebagai unsur penunjang atas kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Mendorong peningkatan koordinasi antara pengelola dengan pengguna anggaran dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Ciamis, Februari 2023

KEPALA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS



ASEP DEDI HERDIANA, SE.  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19650912 199301 1 001

## PENDAHULUAN

### Umum


**B**adan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis menjalankan fungsi Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan, sehingga kedudukannya selain sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dalam melaksanakan fungsinya BPKD Kabupaten Ciamis mengedepankan prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel, Transparan dan Ekonomis.

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi salah satu tolak ukur Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Ciamis sendiri telah meraih Opini WTP dari BPK-RI selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut yang dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1.1

Opini BPK-RI atas LKPD Kabupaten Ciamis

Tahun (n)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Opini BPK-RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



Prestasi diraihnya opini WTP dari BPK-RI tersebut terus dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis terutama didalam penyajian LKPD dengan strategi :

1. Penyajian LKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Keandalan dan Kelengkapan data LKPD;
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI);
4. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

BPKD Kabupaten Ciamis dituntut untuk terus melakukan inovasi-inovasi untuk menghadapi berbagai perkembangan kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam rangka implementasi Transaksi Non Tunai BPKD Kabupaten Ciamis telah bekerjasama dengan bank mitra salahsatunya Bank Jabar Banten sehingga diharapkan kedepan limit transaksi tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis menjadi 0 Rupiah.

Dalam rangka *Fourth Industrial Revolution* (“4IR”) atau Revolusi Industri 4.0 BPKD Kabupaten Ciamis telah menerapkan Sistem Aplikasi yang terintegrasi dari mulai tahapan Perencanaan hingga Pelaporan Keuangan Daerah, hal ini sebagai upaya pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis dan efisien.

Dalam hal tranparansi BPKD Kabupaten Ciamis telah mengembangkan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) khusus bidang pengelolaan keuangan daerah sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang di perlukan terkait Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

### **Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**

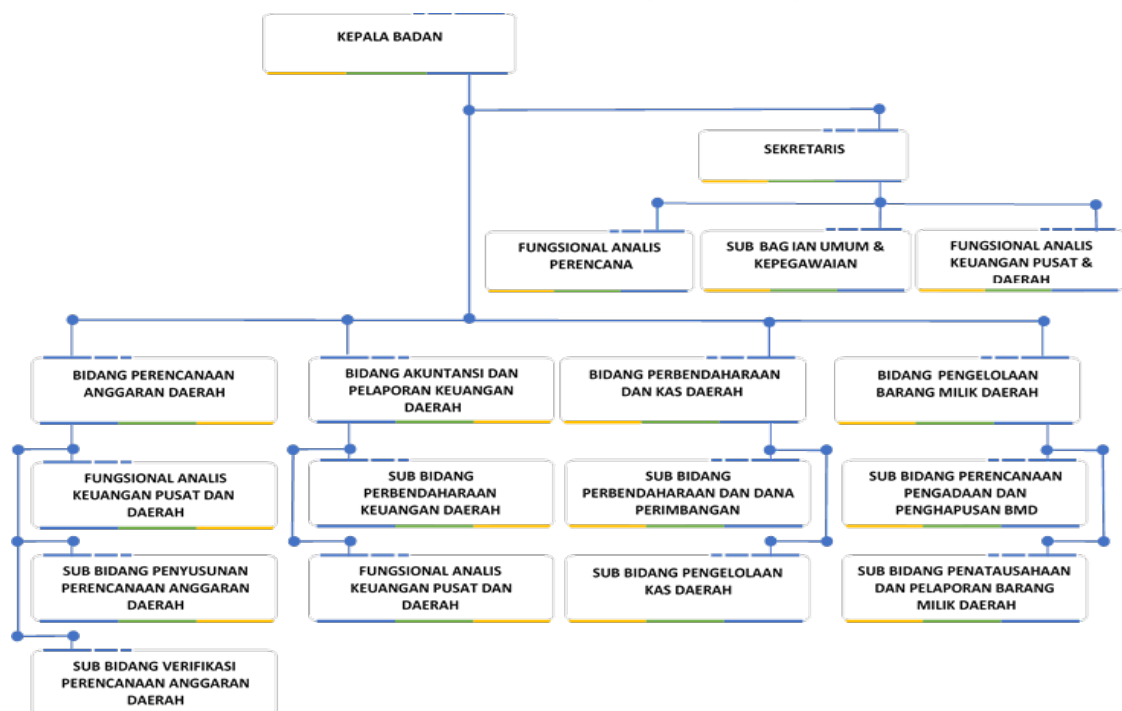
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dengan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis yaitu Melaksanakan Kewenangan Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada bagan berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



## PERENCANAAN KINERJA

### Rencana Strategis Tahun 2019-2024

#### Visi dan Misi

Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis berpedoman pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 dengan Visi “ **Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua** ”

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 6 (tiga) Misi, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- 2) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah
- 3) Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal
- 4) Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
- 5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
- 6) Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa

Berdasarkan Misi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ciamis masuk kedalam Misi yang ke 5, yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien** yaitu Tata



kelola pemerintahan masih belum efektif, sehingga perlu dilakukan tata kelola pemerintahan secara efektif dan efisien.

Adapun tujuan, sasaran dan strategi pencapaian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dari pencapaian Misi ke 5 adalah :

1. Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah,
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah
4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui :

1. Peningkatan pemahaman aparatur dalam penatausahaan dan pengembangan administrasi keuangan daerah;
2. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan, Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien;
3. Peningkatan jumlah PAD dalam tiap tahun anggaran;
4. Peningkatan optimalisasi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pada pelaporan keuangan daerah;
5. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan barang daerah.



**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan**  
**Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Awal (Tahun 2018)		Tahun				
				Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	Level	2	3	3	3	3	4
			Kinerja Pelaporan Keuangan	Angka	765	775	780	780	780	780
	Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	B	A	A	A	A	A	

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Awal (Tahun 2018)		Tahun					
				Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini BPK-RI atas LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
				%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
				%	0,71 (surplus)	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	
				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
				%	- 4,73	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
				%	4,85	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
				%	99,39	100	100	100	100	100	
				%	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	% Kondisi Aset Daerah dalam Kondisi Baik	% Pertumbuhan Pendapatan Daerah	99,39	80	80	80	80	80	80	
			% Pertumbuhan PAD	80	80	80	80	80	80		
			% Realisasi PAD terhadap Target APBD	80	80	80	80	80	80		
			% Kesesuaian Pengadaan Barang Milik Daerah dengan RKBMD	100	100	100	100	100	100		
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	% KIB dan KIR Barang Milik Daerah sesuai dengan kondisi Fisik	% KIB dan KIR Barang Milik Daerah sesuai dengan kondisi Fisik	% Kondisi Aset Daerah dalam Kondisi Baik	100	100	100	100	100	100		
			% Pengamanan Aset	100	100	100	100	100	100		

## Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP BPKD.	BB	BB	BB	BB	A	A
		Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP BPKD	3	3	3	3	3	3
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan BPKD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	
			Ketepatan waktu penetapan APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Aset Daerah Yang Terkelola	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Meningkatnya Kemandirian Anggaran	Persentase Kemandirian Keuangan Daerah	5%	5%	5%	5%	5%	5%

## Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis merupakan target kinerja tahun ke Pertama Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 2019-2024, yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Kementerian PANRB. Adapun Rincian Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel halaman berikut :

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD	Baik
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP BPKD.	BB
3	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP BPKD	3
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan BPKD	775
5	Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu	100%
		Ketepatan waktu penetapan APBD	100%
6	Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Aset Daerah Yang Terkelola	100%
7	Meningkatnya Kemandirian Anggaran	Persentase Kemandirian Keuangan Daerah	5%

Untuk mewujudkan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 dilaksanakan melalui 4 Program, 13 Kegiatan dan 70 Sub Kegiatan dengan rincian Anggaran dan Realisasi sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Pagu Program Tahun 2022  
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.901.407.458	25.109.960.812	90,00
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	11.913.280.500	10.195.300.554	85,58
3.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	498.319.831.199	496.111.299.775	99,56
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.748.817.400	8.701.391.046	99,46
<b>Jumlah</b>		<b>546.883.336.557</b>	<b>540.117.952.187</b>	<b>98,76</b>

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Program Kegiatan  
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kabupaten Ciamis Tahun 2022

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Kinerja Keuangan %	Kinerja Fisik %
	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD+GAJI)</b>	<b>546.883.336.557</b>	<b>540.117.952.187</b>	<b>98,76</b>		
	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>29.293.388.200</b>	<b>26.711.706.931</b>	<b>91,19</b>		
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>27.901.407.458</b>	<b>25.109.960.812</b>	<b>90,00</b>		
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>416.821.400</b>	<b>381.724.600</b>	<b>91,58</b>		
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	700.000	7,00	0.00	0.00
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	0,00	0.00	0.00
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	406.821.400	381.024.600	93,66	40.11	41.00
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>19.542.037.158</b>	<b>17.543.781.481</b>	<b>89,77</b>		
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	22.500.000	22.490.000	99,96	49.87	50.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.600.000	12.600.000	86,30	86.30	87.00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.900.000	12.900.000	100,00	0.00	0.00
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	221.920.000	200.846.000	90,50	45.27	50.00
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.270.117.158	17.294.945.481	89,75	24.73	50.00
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.165.199.000</b>	<b>1.065.920.659</b>	<b>91,48</b>		
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	77.576.000	60.758.000	78,32	15.93	16.00
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.500.000	110.513.950	94,86	34.87	50.00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	242.126.600	235.745.570	97,36	89.31	90.00
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103.187.000	92.437.943	89,58	70.20	75.00
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	375.809.400	318.476.296	84,74	69.19	70.00
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	247.988.900	99,20	22.48	23.00
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.534.220.000</b>	<b>2.178.881.813</b>	<b>85,98</b>		
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	850.730.000	737.894.490	86,74	16.45	17.00
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211.480.000	209.401.471	99,02	0.00	0.00
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	755.510.000	591.950.227	78,35	24.12	25.00
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	688.000.000	613.159.425	89,12	43.48	50.00

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Kinerja Keuangan %	Kinerja Fisik %
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.500.000	26.476.200	92,90	28,97	29,00
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>793.659.900</b>	<b>720.272.744</b>	<b>90,75</b>		
20	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-		0,00	0,00
21	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.980.000	21.386.244	82,32	82,32	83,00
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89.329.650	85.341.750	95,54	14,68	15,00
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	678.350.250	613.544.750	90,45	56,40	57,00
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>3.075.584.800</b>	<b>3.068.979.415</b>	<b>99,79</b>		
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	922.284.800	924.766.415	100,27	49,07	50,00
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.153.300.000	2.144.213.000	99,58	48,34	50,00
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>373.885.200</b>	<b>150.400.100</b>	<b>88,84</b>		
26	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.100.200	36.237.600	95,11	95,11	96,43
27	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00	0,00	0,00
28	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	100,00
29	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	100,00
30	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.100.000	7.100.000	100,00	100,00	100,00
31	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.000.000	11.000.000	100,00	0,00	0,00
32	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	302.685.000	81.062.500	26,78	8,99	9,00
<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>11.913.280.500</b>	<b>10.195.300.554</b>	<b>85,58</b>		
<b>Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>11.913.280.500</b>	<b>10.195.300.554</b>	<b>85,58</b>		
33	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	249.589.800	246.154.200	98,62	33,72	34,00
34	Penatausahaan Barang Milik Daerah	186.386.000	179.501.000	96,31	19,61	20,00
35	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.144.531.800	981.911.540	85,79	24,77	26,00
36	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	214.510.000	211.997.000	98,83	23,60	26,00
37	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	8.667.961.800	7.139.902.914	82,37	29,06	30,00
38	Penyusunan Standar Harga	129.241.100	126.780.300	98,10	62,76	63,00
39	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1.321.060.000	1.309.053.600	99,09	57,89	58,33
<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>498.319.831.199</b>	<b>496.111.299.775</b>	<b>99,56</b>		
<b>Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan</b>		<b>1.351.760.000</b>	<b>1.282.503.575</b>	<b>94,88</b>		
40	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	171.273.000	171.266.475	100,00	36,48	40,00

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Kinerja Keuangan %	Kinerja Fisik %
41	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	136.615.000	122.780.750	89,87	28.35	28.50
42	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	27.640.000	21.950.000	79,41	35.46	36.00
43	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	561.865.000	556.991.350	99,13	41.47	42.00
44	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	269.367.000	256.265.000	95,14	45.80	47.27
45	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	-	0,00	0.00	0.00
46	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	185.000.000	153.250.000	82,84	39.74	40.00
<b>Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>250.000.000</b>	<b>185.496.700</b>	<b>74,20</b>		
47	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	250.000.000	185.496.700	74,20	17.88	20.00
<b>Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		<b>889.210.900</b>	<b>874.183.900</b>	<b>98,31</b>		
48	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	260.000.000	252.474.000	97,11	28.13	29.00
49	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	260.000.000	254.410.000	97,85	59.53	60.00
50	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	51.008.500	50.997.500	99,98	55.70	56.67
51	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	165.000.000	165.000.000	100,00	51.50	52.00
52	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	153.202.400	151.302.400	98,76	42.54	45.00
<b>Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>495.828.860.299</b>	<b>493.769.115.600</b>	<b>99,58</b>		
53	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	3.585.069.444	3.585.069.444	100,00	0.00	0.00
54	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	484.072.560.586	483.307.207.388	99,84	19.08	20.00
55	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.358.241.000	4.705.889.000	87,83	1.39	2.00
56	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.812.989.269	2.170.949.768	77,18	0.00	0.00
<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>8.748.817.400</b>	<b>8.701.391.046</b>	<b>99,46</b>		
<b>Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>8.748.817.400</b>	<b>8.701.391.046</b>	<b>99,46</b>		
57	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1.535.605.000	1.533.076.076	99,84	78.55	79.00
58	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	406.839.000	406.839.000	100,00	49.43	50.00

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Kinerja Keuangan %	Kinerja Fisik %
59	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	40.630.000	36.955.000	90,95	0.00	0.00
60	Penagihan Pajak Daerah	520.000.000	505.603.000	97,23	54.43	55.00
61	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	706.723.000	706.650.000	99,99	34.75	35.00
62	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	383.025.000	382.825.170	99,95	65.19	66.00
63	Penetapan Wajib Pajak Daerah	512.800.000	511.664.664	99,78	34.26	35.00
64	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	953.145.400	953.107.000	100,00	54.26	55.00
65	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.149.697.000	1.146.817.125	99,75	37.39	38.00
66	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	539.631.000	539.428.370	99,96	33.71	34.00
67	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	720.093.000	718.812.100	99,82	66.33	50.00
68	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5.800.000	2.180.000	37,59	0.00	0.00
69	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	903.034.000	888.894.500	98,43	53.33	54.00
70	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	371.795.000	368.539.041	99,12	59.28	60.00

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis dilakukan berdasarkan pengukuran capaian kinerja dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2022, setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).
2. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

Persentase	Predikat
< 100 %	Tidak Tercapai
= 100 %	Tercapai/ Sesuai target
> 100 %	Melebihi Target

Adapun interpretasi terhadap predikat capaian kinerja, baik yang tercapai melebihi target (> 100 %), tercapai sesuai target (= 100 %) maupun yang tidak tercapai (<100 %) dilakukan dengan menggunakan referensi pendekatan


Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan dengan kategori/kriteria sebagai berikut :

No	Persentase Capaian Kinerja	Kategori / Predikat
1.	$\geq 90,00\%$	Sangat Baik / 5
2.	75,00% - 89,99%	Baik / 4
3.	65,00% - 74,99%	Cukup / 3
4.	50,00% - 64,99%	Kurang / 2
5.	$\leq 49,99\%$	Sangat Kurang / 1

3. Membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu;
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019- 2024;
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional (jika ada, misalnya SPM, target Provinsi, dan lain-lain);
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Analisis capaian kinerja sasaran juga dikaitkan dengan program pembangunan yang mendukung upaya pencapaian sasaran dengan sejumlah anggaran yang telah direalisasikan, beserta capaian *output* dan *outcome* dari keseluruhan program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran tersebut, sehingga diketahui sejauhmana program yang dilaksanakan telah mendukung pencapaian sasaran secara optimal.

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap capaian kinerja sasaran strategis, maka dilakukan pengungkapan, analisis dan penjelasan terhadap setiap indikator kinerja sasaran. Analisis terhadap setiap indikator sasaran diawali dengan penjelasan/definisi operasional serta rumus



perhitungan dari masing-masing indikator sasaran guna mengukur realisasi dan capaian kinerja masing-masing indikator sasaran. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara realisasi (capaian nyata) dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta perbandingan dengan target RPJMD. Berdasarkan hasil pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja tersebut diungkapkan pula mengenai faktor-faktor yang mendukung/menghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sasaran yang ditetapkan.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan untuk masing-masing sasaran, dalam akuntabilitas keuangan dihitung anggaran per-sasaran sesuai jumlah program yang mendukung upaya pencapaian sasaran tersebut. Dengan adanya penjelasan program pendukung beserta besaran anggaran yang digunakan untuk masing-masing sasaran, akan lebih mudah untuk membuat akuntabilitas keuangan. Dalam akuntabilitas keuangan ini juga dilakukan analisa/penghitungan terhadap tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk setiap sasaran yang menunjukkan capaian kinerja mencapai dan melebihi target sasaran.

## **B. Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Predikat nilai capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 termasuk kategori sesuai target dengan nilai capaian kinerja rata-rata sebesar 105% atau masih dikategorikan "**Sangat Baik**" karena Persentase Target Kinerjanya  $\geq 90\%$ .

Dari 16 indikator kinerja hanya 1 (satu) indikator yang tidak tercapai, dengan persentase capaian kinerja sebesar 95,87% namun masih masuk predikat "Baik". 3 (tiga) indikator "Melebihi Target" dan 9 (sembilan) indikator "Sesuai Target" dan sisanya 4 (empat) indikator "Tidak Mencapai Target".

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

**A. Sasaran 1 :**

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah.**

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah diukur dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 19 September s/d 19 Oktober 2022 jumlah responden sebanyak 70 orang dengan Mutu Pelayanan = **Sangat Baik (93,29)**.

Tabel 3.1  
Capaian Target Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan  
Publik Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Target Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2022	% Capaian Target Kinerja 2022	% Capaian Target Kinerja 2021
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD	Baik	Sangat Baik	125%	100%

**B. Sasaran 2 :**

**Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah .**

Pencapaian sasaran ini diukur oleh satu indikator kinerja yaitu Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi Evaluasi atas Perencanaan Kinerja; Evaluasi atas Pengukuran Kinerja, Evaluasi atas Pelaporan Kinerja dan Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Target Kinerja Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah

Indikator Kinerja	Target Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2022	% Capaian Target Kinerja 2022	% Capaian Target Kinerja 2021
Hasil Evaluasi AKIP BPKD	BB	BB	100%	100%

### C. Sasaran 3 :

**Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh Terhadap Proses Perancangan dan Pelaksanaan Kebijakan Serta Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.**

Pencapaian sasaran ini oleh satu Indikator Kinerja Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Kesesuaian Atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari Tahapan Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan dengan nilai rata-rata terimbang sebesar 95,80% dan Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Hasil) dengan nilai 3,3352 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (tiga) dengan target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.3

Capaian Target Kinerja Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja	Target Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2022	% Capaian Target Kinerja 2022	% Capaian Target Kinerja 2021
Level Maturitas SPIP BPKD	3	3	100%	100%

#### D. Sasaran 4 :

##### **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.**

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, Opini BPK-RI dibagi dalam empat kategori yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar dan Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer*).

Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 9 (sembilan) kali secara berturut-turut atas LKPD Tahun 2013 s/d 2021. Untuk LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2022 belum diberikan Opini, karena sampai dengan laporan ini dibuat masih diadakan audit oleh Tim BPK-RI.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) artinya bahwa laporan keuangan dengan entitas yang diperiksa, disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Dalam upaya meningkatkan Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan di Tingkat SKPD dan Desa lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis, dilaksanakan kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa dengan beberapa aspek penilaian diantaranya : Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, Nilai Pagu, Rekonsiliasi Aset, Rekonsiliasi SPJ, Kualitas Laporan Keuangan dan Nilai PBB (Desa).

Untuk Kategori Pagu diatas 20 Milyar, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mendapat Peringkat II dengan Nilai sebesar 803,46 dari terget sebesar 775.

## E. Sasaran 5 :

### Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah.

#### 1. Ketepatan Perencanaan Anggaran, Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran APBD

Dalam rangka mewujudkan ketepatan perencanaan anggaran, penatausahaan pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran APBD dilaksanakan melalui Kegiatan Penganggaran Keuangan Daerah dengan 5 Sub Kegiatan dan Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan 6 Sub Kegiatan, adapun output kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Output Kegiatan dan Sub Kegiatan Perencanaan Anggaran,  
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban  
Pelaksanaan Anggaran APBD Tahun 2022

No.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	Target Output Kegiatan	Realisasi Output Kegiatan
1	<b>Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b> Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Dengan Standar Biaya yang Disusun Tepat Waktu:%	<b>889,210,900</b> 100 %	<b>874,183,900</b> 98.31 %
1	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun dan ditetapkan	260,000,000 2 Dok	252,474,000 2 Dok
2	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun dan ditetapkan	260,000,000 5 Dok	254,410,000 5 Dok
3	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Regulasi Tentang Teknis Penyusunan anggaran pembiayaan SKPD yang disusun dan ditetapkan	51,008,500 3 Dok	50,997,500 3 Dok
4	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Kordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD	165,000,000 1 Dok	165,000,000 1 Dok
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun dan diverifikasi	153,202,400 4 Dok	151,302,400 4 Dok

No.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	Target Output Kegiatan	Realisasi Output Kegiatan
2	<b>Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b> % SKPD yang Menyusun LKPD Sesuai SAP dan Tepat Waktu	<b>1,351,760,000</b> 100 %	<b>1,282,503,575</b> 94.88 %
1	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun dan dikoordinasikan	171,273,000 1 Laporan	171,266,475 1 Laporan
2	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	136,615,000 2 Dok	122,780,750 2 Dok
3	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Koordinasi Dengan SKPD Mengenai Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	27,640,000 1 Laporan	21,950,000 1 Laporan
4	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang Disusun dan Dikoordinasikan	561,865,000 1 Laporan	556,991,350 1 Laporan
5	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	269,367,000 55 orang	256,265,000 55 orang
6	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban yang direkonsiliasi dan diverifikasi	185,000,000 1 Dok	153,250,000 1 Dok

## 2. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

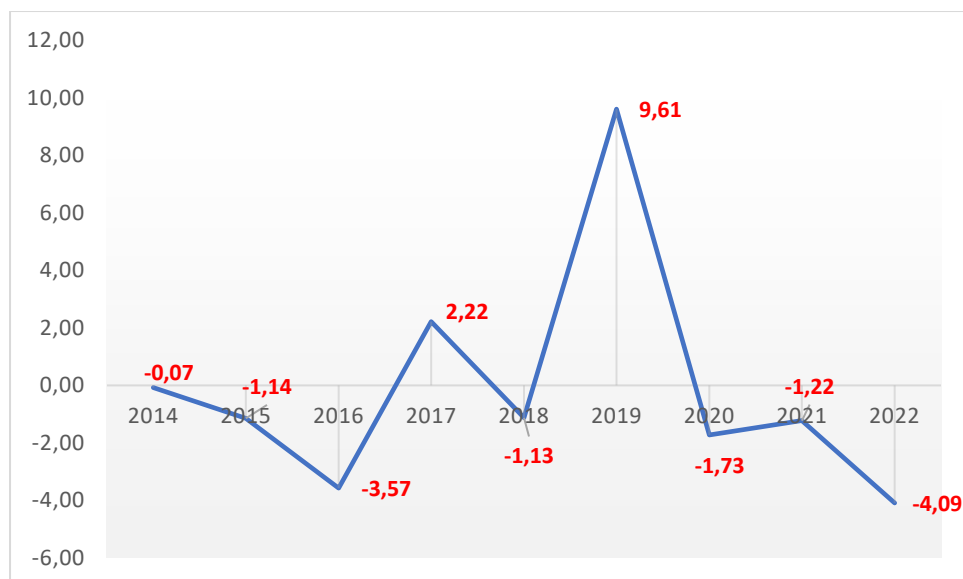
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Ciamis diperoleh total Realisasi Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 2.710.847.497.532,70 atau 98,48% dari Target Rp. 2.752.587.549.391,00 sedangkan Realisasi Belanja sebesar Rp. 2.826.412.430.898,00 atau 93,64% dari Anggaran Belanja Rp. 3.018.352.617.682,00 dengan SILPA Tahun 2022 sebesar Rp. 47.011.744.046,84.

Berdasarkan data tersebut diatas yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2019, maka pada Tahun Anggaran 2022 APBD Kabupaten Ciamis mengalami Defisit - 4,09% atau sebesar Rp. - 115.564.933.365,30.

Tabel 3.5  
Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Ciamis  
Tahun 2014-2022

No	Tahun	Realisasi		Surplus / (Defisit)
		Pendapatan	Belanja	
1	2014	2.005.675.646.809,00	2.007.151.405.720,00	(1.475.758.911)
2	2015	2.292.554.400.814,00	2.319.078.153.287,00	(26.523.752.473)
3	2016	2.372.854.213.034,60	2.460.806.671.948,00	(87.952.458.913)
4	2017	2.582.166.044.869,56	2.526.057.464.021,00	56.108.580.849
5	2018	2.573.609.421.909,00	2.602.915.468.682,00	(29.306.046.773)
6	2019	2.951.167.251.682,52	2.692.441.815.586,00	58.725.436.097
7	2020	2.620.226.692.430,16	2.666.314.834.566,00	(46.088.142.135)
8	2021	2.673.329.176.302,30	2.706.101.857.046,00	(32.772.680.743,70)
9	2022	2.710.847.497.532,70	2.826.412.430.898,00	(115.564.933.365,30)

Gambar 3.1  
Grafik Surplus / Defisit APBD Tahun 2022



Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 3.018.352.617.682,00, dengan realisasi sebesar Rp. 2.826.412.430.898,00 atau 93,64% dari anggaran yang telah ditetapkan yang terdiri dari Realisasi Belanja Operasi Rp. 1.887.923.967.070,00; Belanja Modal Rp. 448.304.417.672,00; Belanja Tidak Terduga Rp. 2.170.949.768,00; dan Belanja Transfer Rp. 488.013.096.388,00 .

Pembiayaan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 265.765.068.291,00 terealisasi sebesar Rp. 162.576.677.412,14 atau 61,17% yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Rp. 254.351.997.270,14 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 91.775.319.858,00.

Berikut adalah rincian Realisasi APBD Tahun Anggaran Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022 yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6  
Realisasi APBD Kabupaten Ciamis  
Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.752.587.549.391,00</b>	<b>2.710.847.497.532,70</b>	<b>98,48</b>
4.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	282.663.303.302,00	300.863.577.475,70	106,44
4.2.	Pendapatan Transfer	2.450.171.660.359,00	2.384.620.849.327,00	97,32
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	19.752.585.730,00	25.363.070.730,00	128,40
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.018.352.617.682,00</b>	<b>2.826.412.430.898,00</b>	<b>93,64</b>
5.1.	Belanja Operasi	2.004.932.590.664,00	1.887.923.967.070,00	94,16
5.2.	Belanja Modal	521.176.236.163,00	448.304.417.672,00	86,02
5.3.	Belanja Tidak Terduga	2.812.989.269,00	2.170.949.768,00	77,18
5.4.	Belanja Transfer	489.430.801.586,00	488.013.096.388,00	99,71
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>-265.765.068.291,00</b>	<b>-115.564.933.365,30</b>	<b>43,48</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>265.765.068.291,00</b>	<b>162.576.677.412,14</b>	<b>61,17</b>
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	359.083.318.291,00	254.351.997.270,14	70,83
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	93.318.250.000,00	91.775.319.858,00	98,35
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>265.765.068.291,00</b>	<b>162.576.677.412,14</b>	<b>61,17</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>47.011.744.046,84</b>	<b>438.520,00</b>

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA. 2022 sebelum Audit BPK RI

## F. Sasaran 6 :

### Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah.

Pencapaian sasaran Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah diukur dari indikator Persentase Aset Daerah Yang Terkelola yang terdiri dari sub indikator Persentas Kesesuaian Pengadaan Barang Milik Daerah dengan RKBMD, Kondisi Aset Daerah dalam Kondisi Baik, Pengamanan Aset ( Sertipikat Tanah Pemda ), Pengawasan dan Pengendalian ( Sewa Tanah dan Bangunan ) dan Penyelesaian Kerugian Daerah, dengan target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Capaian Target Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja 2021
Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah	% Aset Daerah Yang Terkelola	100%	108,92%	108,00%
	1. % Kesesuaian Pengadaan Barang Milik Daerah dengan RKBMD	100%	100%	100,00%
	2. % Kondisi Aset Daerah dalam Kondisi Baik	100%	98,75%	123,44%
	3. % Pengamanan Aset	100%	132,50%	132,50%
	4. % Pengawasan dan Pengendalian	100%	136,04%	136,04%
	5. Penyelesaian Kerugian Daerah	100%	77,29	77,29%

### 1. Penatausahaan Aset Yang Berkualitas

Indikator Penatausahaan Aset yang Berkualitas diukur dengan realisasi dari output 7 Sub Kegiatan sebagaimana berikut :

Tabel 3.8  
Output Kegiatan, Sub Kegiatan dan Program Pengelolaan  
Barang Milik Daerah

No.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	Target Output Kegiatan	Realisasi Output Kegiatan
1	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH %SKPD yang Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	11,913,280,500 100 %	10,195,300,554 87.00 %
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	11,913,280,500	10,195,300,554

No.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	Target Output Kegiatan	Realisasi Output Kegiatan
	Jumlah BMD yang Dikelola Dengan Baik: %	100 %	85.58 %
1	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	249,589,800	246,154,200
	Jumlah BMD yang Dioptimalisasikan Penggunaan Pemamfaatan, Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan BMD	12 Dok	12 Dok
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	186,386,000	179,501,000
	Jumlah Barang Milik Daerah yang Ditatausahakan	2 Lap	2 Lap
3	Pengamanan Barang Milik Daerah	1,144,531,800	981,911,540
	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diamankan	1 Lap	1 Lap
4	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	214,510,000	211,997,000
	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diawasi dan Dikelola	2 Lap	2 Lap
5	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	8,667,961,800	7,139,902,914
	Jumlah SKPD yang Menyusun RKBMD Tepat Waktu	1 Dok	1 Dok
6	Penyusunan Standar Harga	129,241,100	126,780,300
	Jumlah Dokumen Standar Harga	1 Dok	1 Dok
7	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1,321,060,000	1,309,053,600
	Jumlah Barang Milik Daerah yang disusun Laporannya	12 Lap	12 Lap

## 2. Penyelesaian Kerugian Daerah (PKD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, bahwa yang di maksud dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian Negara/Daerah.

Perhitungan Indikator TGR adalah persentase (%) realisasi Penyelesaian atas Kerugian Daerah yang telah di tetapkan oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah. Adapun Penyelesaian Kerugian Daerah (PKD) hingga Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9  
 Realisasi Penyelesaian Kerugian Daerah s.d 31 Desember 2022

No	Klasifikasi	Nominal (Rp)	% Terhadap Saldo Piutang
1	Saldo Piutang TP-TGR s.d 31 Desember 2021	1.612.522.817	-
2	Piutang TP-TGR yang dibebaskan oleh Majelis Pertimbangan PKD (2019)	1.120.981.224	69,52
3	Keringanan Majelis Pertimbangan PKD (2019)	20.000.000	1,24
4	Realisasi Pembayaran PKD s.d 31 Desember 2021	105.288.197	6,22
	<b>Piutang PKD per 31 Des 2022</b>	<b>366.253.396</b>	<b>22,71</b>

Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa Piutang Penyelesaian Kerugian Daerah s.d 31 Desember 2022 sebesar 77,29%, namun untuk Realisasi Pembayaran PKD baru sebesar 22,71%, hal tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Masih ada tertanggung yang alih tugas ke Daerah Otonomi Baru Pangandaran;
- b. Masih ada kasus-kasus yang masih dilakukan penagihan oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD) dan KPKNL Tasikmalaya.

#### G. Sasaran 7 :

##### **Meningkatnya Kemandirian Anggaran.**

##### **1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah**

Sumber Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Ciamis terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Dana Perimbangan; dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai aturan yang berlaku. Pada Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp. 2.752.587.549.391,00 dengan realisasi Rp. 2.710.847.497.532,70 atau realisasi 98,48%. Target, realisasi, dan kontribusi masing-masing kelompok pendapatan terhadap

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis  
Tahun Anggaran 2022

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			Kontribusi terhadap Pendapatan (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pendapatan Asli Daerah	282.663.303.302,00	300.863.577.475,70	106,44	11,10
Pendapatan Transfer	2.450.171.660.359,00	2.384.620.849.327,00	97,32	87,97
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	19.752.585.730,00	25.363.070.730,00	128,40	0,94
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.752.587.549.391,00</b>	<b>2.710.847.497.532,70</b>	<b>98,48</b>	

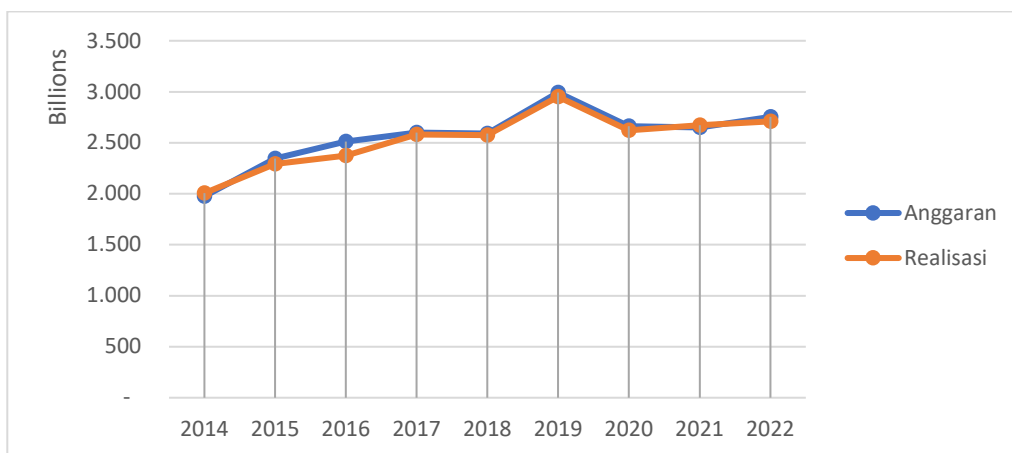
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA. 2022 sebelum Audit BPK RI

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam APBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 282.663.303.302,00 dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 300.863.577.475,70 atau tercapai sebesar 106,44% dari target yang telah ditetapkan atau lebih target sebesar Rp. 18.200.274.173,70 dengan kontribusi kepada pendapatan daerah sebesar 11,10%, dari Pendapatan Transfer 87,97% dan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar 0,94%. Jadi kontribusi terbesar kepada pendapatan daerah yaitu dari Pendapatan Transfer.

Tabel 3.11  
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Ciamis  
Tahun 2014-2022

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2014	1.975.080.512.019,00	2.005.675.646.809,00	101,55
2	2015	2.347.045.503.964,00	2.292.554.400.813,80	97,68
3	2016	2.512.478.052.246,00	2.372.854.213.034,60	94,44
4	2017	2.598.280.261.738,00	2.582.166.044.869,56	99,38
5	2018	2.591.897.874.505,00	2.573.609.421.909,00	99,29
6	2019	2.992.362.402.748,00	2.951.167.251.682,52	98,62
7	2020	2.661.651.382.865,00	2.620.226.692.430,16	98,44
8	2021	2.649.483.466.620,00	2.672.964.154.362,00	100,89
9	2022	2.752.587.549.391,00	2.710.847.497.532,70	98,48

Grafik 3.2  
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2022



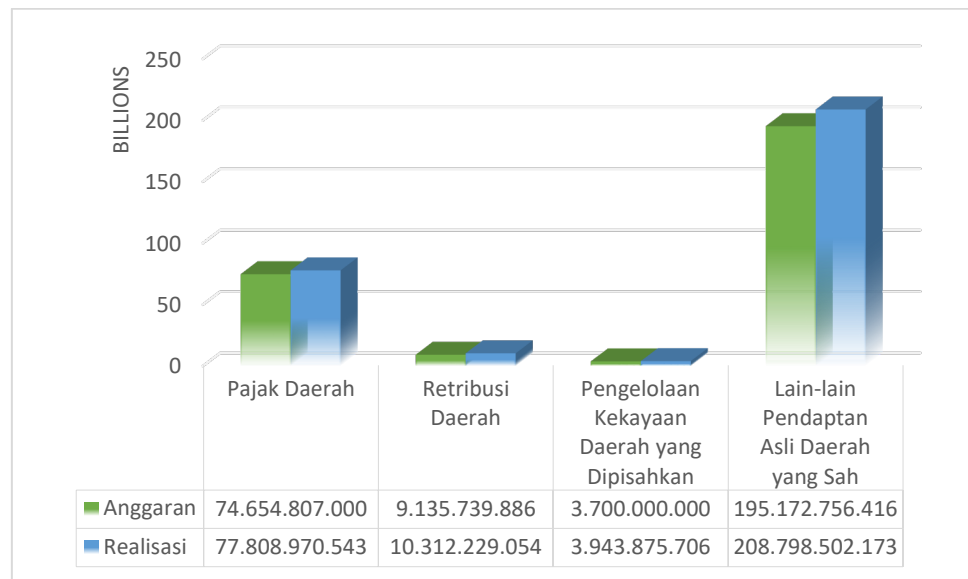
Tabel 3.12  
Capaian Target Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Indikator Kinerja	Target Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2022	% Capaian Target Kinerja 2022	% Capaian Target Kinerja 2022
1. % Pertumbuhan PAD	5%	1,42%	28,35%	63,80%
2. % Realisasi PAD terhadap Target APBD	100%	98,48%	98,48%	100,89%

Tabel 3.13  
Realisasi PAD Tahun Anggaran 2021 dan 2022

Jenis Pendapatan	Tahun 2022			Realisasi 2021	%
	Anggaran	Realisasi	%		
Pajak Daerah	74.654.807.000,00	77.808.970.542,70	104,22	70.573.588.106,00	107,70
Retribusi Daerah	9.135.739.886,00	10.312.229.054,00	112,88	7.512.811.662,00	112,58
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.700.000.000,00	3.943.875.706,00	106,59	3.246.369.013,00	87,739
Lain-lain Pendaptan Asli Daerah yang Sah	195.172.756.416,00	208.798.502.173,00	106,98	191.801.502.648,00	117,79
<b>Jumlah Total PAD</b>	<b>282.663.303.302,00</b>	<b>300.863.577.475,70</b>	<b>106,44</b>	<b>273.134.271.429,00</b>	<b>114,41</b>

Grafik 3.3  
Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022



## 2. Pendapatan Asli Daerah

Pada Tahun 2022 ditetapkan target Pendapatan Asli Daerah sebesar 282,66 Milyar, didalam Laporan Realisasi APBD per 31 Desember 2022 diketahui bahwa pencapaian PAD sebesar 300,86 Milyar atau 106,44%.

Adapaun perbandingan target kinerja PAD pada Perjanjian Kinerja BPKD dan Realisasi PAD setiap tahun anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.14  
Capaian Target Kinerja dengan Realisasi

Tahun (n)	Target PAD	Realisasi PAD
2015	146,00 Milyar	180,30 Milyar
2016	164,00 Milyar	204,75 Milyar
2017	200,69 Milyar	223,07 Milyar
2018	200,69 Milyar	234,61 Milyar
2019	243,05 Milyar	264,29 Milyar
2020	240,80 Milyar	254,19 Milyar
2021	238,73 Milyar	273,00 Milyar
2022	282,66 Milyar	300,86 Milyar

Grafik 3.4  
Target dan Realisasi PAD 2015-2022



### 3. Optimalisasi Data Potensi Pajak

Terlaksananya Optimalisasi Data Potensi Pajak diukur dengan pencapaian kinerja Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.15  
Output Kegiatan , Sub Kegiatan dan Program  
Pengelolaan Pendapatan Daerah

No.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	Target Output Kegiatan	Realisasi Output Kegiatan
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>8,748,817,400</b>	<b>8,701,391,046</b>
	%Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5 %	3 %
	<b>Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>8,748,817,400</b>	<b>8,701,391,046</b>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang Diterima : %	100 %	56 %
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1,535,605,000	1,533,076,076
	Jumlah Kajian Pajak Daerah yang Dikembangkan dan Dianalisis	1 Dok	1 Dok
	2 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	406,839,000	406,839,000
	Laporan Jumlah Wajib Pajak yang Difasilitasi Konsultasi	40 Layanan	40 Layanan
3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	40,630,000	36,955,000
	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah yang Dilaksanakan	1 Lap	1 Lap

No.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	Target Output Kegiatan	Realisasi Output Kegiatan
4	Penagihan Pajak Daerah	520,000,000	505,603,000
	Jumlah Laporan Pajak Daerah yang Ditagih	1 Dok	1 Dok
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	706,723,000	706,650,000
	Jumlah Objek Pajak yang didata dan didaftarkan	1 Lap	1 Lap
6	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	383,025,000	382,825,170
	Jumlah Laporan Pajak Daerah yang Diverifikasi	1 Dok	1 Dok
7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	512,800,000	511,664,664
	Jumlah Laporan Dokumen Penetapan Wajib Pajak Daerah	1 Dok	1 Dok
8	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	953,145,400	953,107,000
	Jumlah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah yang Dilaksanakan	1 Dok	1 Dok
9	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1,149,697,000	1,146,817,125
	Jumlah Dokumen laporan Basis data pajak daerah	1 Lap	1 Lap
10	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	539,631,000	539,428,370
	Terlaksananya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	50 Objek Pajak	50 Objek Pajak
11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	720,093,000	718,812,100
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang Disediakan	12 Unit	12 Unit
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5,800,000	2,180,000
	Jumlah Laporan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah yang Dilaksanakan	1 Dok	1 Dok
13	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	903,034,000	888,894,500
	Jumlah Kebijakan Pajak Daerah yang Disebarluaskan	1 Lap	1 Lap
14	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	371,795,000	368,539,041
	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dok	1 Dok

### C. Realisasi Belanja

#### Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

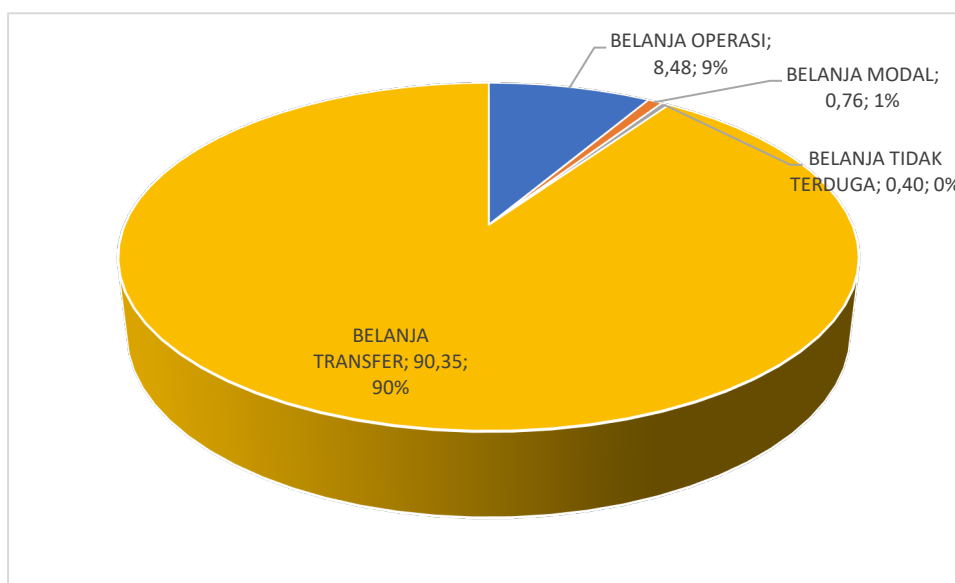
Jumlah anggaran dari Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 546.883.336.557,00 dengan

realisasi sebesar Rp. 540.116.019.547,00 atau sebesar 98,76%. Adapun rincian atas Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.16  
Realisasi Belanja BPKD Kabupaten Ciamis  
Tahun Anggaran 2022

Kode Rek	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
5.1.	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>49.043.412.380,00</b>	<b>45.807.498.856,00</b>	<b>93,40</b>
5.1.01.	Belanja Pegawai	19.254.914.220,00	17.273.108.872,00	89,71
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.250.128.716,00	22.022.187.850,00	94,72
5.1.03.	Belanja Bunga	3.585.069.444,00	3.585.069.444,00	100,00
5.1.05.	Belanja Hibah	2.953.300.000,00	2.927.132.690,00	99,11
5.2.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.596.133.322,00</b>	<b>4.124.474.535,00</b>	<b>73,70</b>
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	1.709.000.000,00	740.890.000,00	43,35
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.118.064.250,00	2.616.848.535,00	83,93
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	769.069.072,00	766.736.000,00	99,70
5.3.	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.812.989.269,00</b>	<b>2.170.949.768,00</b>	<b>77,18</b>
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	2.812.989.269,00	2.170.949.768,00	77,18
5.4.	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>489.430.801.586,00</b>	<b>488.013.096.388,00</b>	<b>99,71</b>
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	5.358.241.000,00	4.705.889.000,00	87,83
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	484.072.560.586,00	483.307.207.388,00	99,84

Grafik 3.5  
Proporsi Belanja BPKD Tahun 2022



Tabel. 3.17

Realisasi Belanja Per Program Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022

No	Program	Anggaran	Realisasi	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.901.407.458	25.109.960.812	90,00
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	11.913.280.500	10.195.300.554	85,58
3.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.351.760.000	1.282.503.575	94,88
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.748.817.400	8.701.391.046	99,46
<b>Jumlah</b>		<b>546.883.336.557</b>	<b>540.117.952.187</b>	<b>98,76</b>

Dalam melaksanakan kebijakan Program dan Kegiatan Tahun 2022 kami masih dihadapkan pada beberapa kendala. Adapun permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah belum dapat digunakan secara optimal, hal ini disebabkan tahapan pengelolaan keuangan masih belum terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai pelaporan;
2. Potensi PAD belum tergali secara optimal;
3. Belum optimalnya kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi untuk membayar Pajak dan Retribusi;
4. Belum optimalnya sistem pengelolaan aset terutama pada SKPD yang memiliki rentang kendali yang luas.

Namun demikian berkat dukungan dari Pimpinan Daerah, SKPD dan stakeholders lainnya, kami dapat mengatasi permasalahan tersebut. Adapun upaya dalam mengatasi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
3. Meningkatkan kapasitas kompetensi aparatur pengelolaan keuangan daerah dan berkerja sama dengan pihak dan instansi terkait;
4. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah dan Koordinasi yang intens dengan SKPD yang memiliki rentang kendali yang luas dan peningkatan SDM di tiap SKPD;
5. Mengoptimalkan sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan daerah.

## PENUTUP

**B**erdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran, secara keseluruhan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dalam Tahun Anggaran 2022 telah berhasil dalam melaksanakan seluruh kebijakan / program dan kegiatan.

Dalam melaksanakan kebijakan Program dan Kegiatan Tahun 2022 kami masih dihadapkan pada beberapa kendala. Namun demikian berkat dukungan dari Pimpinan Daerah, SKPD dan stakeholders lainnya, kami dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Adapun langkah-langkah perbaikan untuk mengantisipasi permasalahan atau kendala di masa yang akan datang diantaranya adalah :

1. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan serta regulasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
2. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah melalui kolaborasi internal dan eksternal serta pemanfaatan teknologi informasi;
3. Ekstensifikasi melalui penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lain;
4. Optimalisasi BUMD untuk peningkatan kontribusi terhadap PAD;
5. Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset yang lebih produktif sesuai kebutuhan masyarakat agar lebih berkontribusi terhadap PAD;
6. Pemberian insentif pajak daerah dalam kemudahan berusaha/berinvestasi;
7. Penyempurnaan dalam penyusunan program/sistem pengelolaan keuangan, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan;

8. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan sebagai unsur penunjang atas kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Mendorong peningkatan koordinasi antara pengelola dengan pengguna anggaran dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Dengan dukungan komitmen dan kebersamaan dari aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan semua pihak yang terkait, diharapkan kedepan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis lebih meningkat dan dapat memberikan dampak dalam menunjang pembangunan tatar galuh, sehingga dapat mewujudkan Visi Kabupaten Ciamis yaitu “Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua”.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami sangat mengharapkan tanggapan, saran dan kritik yang konstruktif dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, dan kami akan berusaha menyusun dan membuat program yang lebih baik dimasa yang akan datang, dengan harapan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini akan mewujudkan kinerja yang lebih baik dan maksimal dalam rangka mendukung terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

Ciamis, Februari 2023

KEPALA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS



ASEP DEDI HERDIANA, SE.  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19650912 199301 1 001



# LAMPIRAN



# PERFORMANCE REPORT

**L K I P**

**2022**